



INTISARI

Pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pada penelitian ini pelayanan pendaftaran penduduk dibatasi pada pelayanan Kartu Keluarga, dan pelayanan pencatatan sipil dibatasi pada pelayanan akta kematian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, observasi, dan wawancara mendalam (*indepth interview*). Pada penelitian ini digunakan teori implementasi kebijakan model George Edwards III yaitu komunikasi, sumber daya, kecenderungan atau disposisi, dan struktur birokrasi untuk melihat permasalahan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Hasil penelitian menunjukkan masih banyak penduduk yang tidak melakukan pembaharuan data kependudukan karena penyampaian informasi dari Dinas tentang pentingnya data kependudukan tidak optimal. Hal ini menyebabkan elemen data kependudukan yang tercantum di dalam Kartu Keluarga belum akurat. Pada pelaporan kematian, data penyebab kematian juga belum dapat dikatakan akurat karena terbatas pada pilihan penyebab kematian yang ada di surat keterangan kematian. Ditinjau dari faktor sumber daya staf, ditemukan petugas pelayanan Kartu Keluarga yang belum memahami kriteria jenis pendidikan dan jenis pekerjaan yang ada pada Kartu Keluarga. Ketidakakuratan data kependudukan yang dihasilkan dari pelayanan Kartu Keluarga dan pelayanan Akta Kematian, menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bantul belum bisa memenuhi keinginan dari Pemerintah Pusat. Beberapa hal tersebut menyebabkan data kependudukan belum dapat digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan khususnya di Kabupaten Bantul.

Kata Kunci : Administrasi Kependudukan, Kartu Keluarga, Akta Kematian, Data Kependudukan



ABSTRACT

Civil administration and registration services in Bantul District is carried out by the Population Registers and Civil Registration Department. In this study, the civil administration service is limited to the Kartu Keluarga (Family Register) service, and the civil registration service is limited to the death certificate service. This study uses a qualitative method. Data collection techniques used includes : literature study, observation, and in-depth interviews. This research used the theory of public policy implementation model by George Edwards III that is consist of communication, resources, tendency or disposition, and bureaucracy structure to see the problem within civil administration and civil registration service.

The result of this study shows that there are still many residents who did not update their demographic data because of the pessimal information from the Department about the importance of population data which caused the demographic data elements listed in the Family Register Card deemed inaccurate. In the recognition of death, the causes of death data also deemed to be inaccurate because of its limited option of the causes of death written in the certificate. From the staff resource, there are some Family Register service officers who do not understand the type of education criterion and types of work criterion that exist on the Family Register Card.

The inaccuracy of population data resulting from the Family Register service and the Death Certificate service indicates that the Bantul District Government has not been able to fulfill the requirements of the Central Government. All of these causes the population data cannot be used yet as the basis data for development planning, especially in Bantul District.

Keywords: Civil Administration, Family register, Death certificate, Population Data